



Journal of Social and Economics Research

Volume 8, Issue 2, December 2026

P-ISSN: 2715-6117

E-ISSN: 2715-6966

Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL BERBASIS BLUSUKAN DALAM TATA KELOLA BERKELANJUTAN: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW PADA KONTEKS PERKOTAAN DAN PEDESAAN

BLUSUKAN-BASED TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN SUSTAINABLE GOVERNANCE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW IN URBAN AND RURAL CONTEXTS

Asep Wawan¹, Ismail Nurdin²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Email: asepwawan755@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Kepemimpinan Transformasional; Blusukan; Partisipasi Masyarakat; Kepercayaan Publik; Tata Kelola Berkelanjutan; Systematic Literature Review.

ABSTRAK

Kepemimpinan transformasional menekankan kemampuan pemimpin membangun visi, menginspirasi, memperhatikan kebutuhan pengikut, serta mendorong perubahan kolektif. Dalam konteks Indonesia, salah satu praktik kepemimpinan yang memiliki kedekatan dengan karakter tersebut adalah blusukan, yaitu gaya kepemimpinan yang dilakukan melalui keterlibatan langsung pemimpin dengan masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis kepemimpinan transformasional berbasis blusukan dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat, kepercayaan publik, serta tata kelola berkelanjutan pada konteks perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan tahapan PRISMA yang diadaptasi. Sebanyak 39 dokumen awal diidentifikasi, 10 dokumen duplikat dikeluarkan, 29 dokumen unik disaring, dan 22 dokumen dinilai layak dianalisis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa blusukan dapat dipahami sebagai bentuk operasional kepemimpinan transformasional karena mempertemukan pemimpin dengan realitas sosial, memperkuat komunikasi langsung, dan mendorong responsivitas kebijakan. Namun, efektivitasnya bergantung pada tindak lanjut institusional. Dalam konteks perkotaan, blusukan perlu dikombinasikan dengan tata kelola digital dan sistem pengaduan publik. Dalam konteks pedesaan, blusukan lebih efektif ketika berakar pada nilai budaya, jaringan sosial, dan musyawarah lokal. Artikel ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional berbasis blusukan berpotensi memperkuat tata kelola berkelanjutan apabila diterapkan secara partisipatif, terukur, dan akuntabel.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: Transformational Leadership; Blusukan; Citizen Participation; Public Trust; Sustainable Governance; Systematic Literature Review.	<i>Transformational leadership emphasizes the leader's ability to articulate vision, inspire followers, address individual needs, and stimulate collective change. In the Indonesian context, one leadership practice closely associated with these characteristics is blusukan, a direct-engagement leadership style in which leaders interact closely with citizens to understand public problems. This article aims to analyze blusukan-based transformational leadership in relation to citizen participation, public trust, and sustainable governance in urban and rural contexts. This study employed a Systematic Literature Review (SLR) method using an adapted PRISMA procedure. A total of 39 initial documents were identified, 10 duplicates were removed, 29 unique documents were screened, and 22 documents were included for thematic analysis. The findings indicate that blusukan can be understood as an operational form of transformational leadership because it connects leaders with social realities, strengthens direct communication, and promotes policy responsiveness. However, its effectiveness depends on institutional follow-up mechanisms. In urban settings, blusukan should be integrated with digital governance and public complaint systems. In rural settings, it is more effective when rooted in cultural values, social networks, and local deliberation. The article concludes that blusukan-based transformational leadership can strengthen sustainable governance when implemented in a participatory, measurable, and accountable manner.</i>

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kajian kepemimpinan publik semakin penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang responsif, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam paradigma tata kelola kontemporer, pemimpin tidak lagi cukup dipahami sebagai aktor formal yang menjalankan kewenangan administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membangun kepercayaan, menggerakkan partisipasi, serta menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pergeseran ini menjadikan kepemimpinan transformasional relevan dalam studi administrasi publik karena menempatkan perubahan nilai, motivasi, dan keterlibatan masyarakat sebagai elemen penting dalam proses pemerintahan (Burns, 1978; Bass, 1985; Bass & Riggio, 2006; Kolomycew, 2019).

Kepemimpinan transformasional menekankan bahwa pemimpin tidak hanya melakukan pertukaran kepentingan dengan pengikut, tetapi juga mengangkat motivasi, moralitas, dan komitmen kolektif menuju tujuan bersama (Burns, 1978; Bass, 1985). Dalam sektor publik, karakter ini muncul ketika pemimpin mampu membangun visi perubahan, memberi inspirasi, mendorong inovasi, serta memberi perhatian pada kebutuhan warga. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional dapat menjadi lensa teoretis untuk memahami bagaimana pemimpin publik menciptakan perubahan sosial dan kelembagaan (Bass & Riggio, 2006; Kamselem et al., 2026; Kasuwi, 2025).

Dalam konteks Indonesia, salah satu bentuk praktik kepemimpinan yang memiliki kedekatan dengan karakter transformasional adalah blusukan. Blusukan dipahami sebagai praktik turun langsung ke masyarakat untuk melihat kondisi lapangan, mendengar aspirasi warga, dan memahami persoalan publik secara langsung (Nasution, 2014; Wekke, n.d.). Praktik ini populer dalam kepemimpinan lokal dan nasional, terutama melalui figur pemimpin seperti Joko Widodo, Tri Rismaharini, dan sejumlah kepala daerah lain. Namun, blusukan tidak hanya dapat dipahami sebagai strategi komunikasi politik atau pencitraan, melainkan juga sebagai mekanisme kepemimpinan berbasis keterlibatan langsung (Ridhoi et al., 2021; Wekke, n.d.).

Secara konseptual, blusukan memiliki tiga potensi penting. Pertama, blusukan memungkinkan pemimpin memperoleh informasi langsung dari masyarakat sebagai sumber utama masalah. Kedua, informasi langsung dapat memperkuat akurasi perumusan kebijakan. Ketiga, blusukan dapat membangun kedekatan psikologis antara pemimpin dan warga (Nasution, 2014). Ketiga aspek ini sejalan dengan dimensi kepemimpinan transformasional, terutama *individualized consideration*, *inspirational motivation*, dan *intellectual stimulation* (Bass & Riggio, 2006). Akan tetapi, blusukan juga memiliki risiko apabila hanya berhenti sebagai simbol kedekatan tanpa tindak lanjut kebijakan yang jelas (Ridhoi et al., 2021).

Relevansi blusukan juga terkait dengan tata kelola berkelanjutan. Sustainable governance menuntut adanya kemampuan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, adaptif, akuntabel, dan memperhatikan keberlanjutan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Dalam hal ini, pemimpin yang turun langsung ke masyarakat berpotensi lebih mampu membaca kebutuhan warga, menghubungkan berbagai aktor, dan membangun legitimasi kebijakan. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-geografis karena tata kelola berkelanjutan memerlukan kolaborasi lintas aktor, keselarasan kepentingan, serta mekanisme akuntabilitas yang terlembaga (Bendell et al., 2011; Florini & Pauli, 2018).

Konteks perkotaan ditandai oleh kompleksitas masalah, heterogenitas warga, tuntutan layanan cepat, serta meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam tata kelola (Bruun, 2024; Yousefvand, 2024). Sebaliknya, konteks pedesaan lebih banyak ditentukan oleh jaringan sosial, nilai budaya, musyawarah lokal, keterbatasan sumber daya, dan kedekatan sosial antara pemimpin dan warga (Hussain, 2023; Tian & Yan, 2022). Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah kepemimpinan transformasional berbasis blusukan bekerja dengan cara yang sama dalam konteks perkotaan dan pedesaan?

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan transformasional berbasis blusukan dalam tata kelola berkelanjutan dengan menggunakan metode Systematic Literature Review. Secara khusus, artikel ini menjawab empat pertanyaan penelitian: (1) bagaimana konsep blusukan dipahami dalam literatur kepemimpinan publik; (2) bagaimana hubungan blusukan dengan kepemimpinan transformasional, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan publik; (3) bagaimana perbedaan penerapan blusukan dalam konteks perkotaan dan pedesaan; dan (4) bagaimana kontribusi blusukan terhadap tata kelola berkelanjutan (Page et al., 2021).

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). SLR dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur secara sistematis untuk memperoleh pemahaman konseptual yang lebih terstruktur. Dalam artikel ini, SLR digunakan untuk memetakan literatur mengenai kepemimpinan transformasional, blusukan, partisipasi masyarakat, kepercayaan publik, tata kelola perkotaan, tata kelola pedesaan, dan tata kelola berkelanjutan (Page et al., 2021; Achuti, 2026).

Proses review mengacu pada tahapan PRISMA yang diadaptasi, yaitu identifikasi, penghapusan duplikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi. Adaptasi dilakukan karena korpus literatur berasal dari kumpulan artikel yang telah dihimpun peneliti melalui pencarian ulang dan dokumen akademik yang tersedia, bukan dari satu database tunggal. Oleh karena itu, transparansi proses seleksi menjadi prinsip utama dalam penelitian ini (Page et al., 2021).

Sumber Data dan Strategi Pencarian

Sumber data penelitian berupa dokumen akademik yang relevan dengan tema kepemimpinan transformasional berbasis blusukan dan tata kelola berkelanjutan. Literatur yang dihimpun mencakup artikel jurnal, artikel prosiding, disertasi, dan dokumen akademik pendukung. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian dan pengelompokan literatur meliputi: 'kepemimpinan transformasional', '*transformational leadership*', 'blusukan', 'kepemimpinan publik', '*participative leadership*', '*public participation*', '*public trust*', 'collaborative governance', 'sustainable governance', 'urban governance', 'rural governance', dan 'smart governance' (Nasution, 2014; Kolomycew, 2019; Florini & Pauli, 2018; Bruun, 2024).

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi digunakan untuk memastikan bahwa dokumen yang dianalisis benar-benar relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang dimasukkan adalah dokumen yang membahas salah satu atau beberapa tema berikut: kepemimpinan transformasional, blusukan atau keterlibatan langsung pemimpin, partisipasi masyarakat, kepercayaan publik, tata kelola perkotaan, tata kelola pedesaan, tata kelola kolaboratif, dan tata kelola berkelanjutan (Bass & Riggio, 2006; Nasution, 2014; Kolomycew, 2019; Yousefvand, 2024). Dokumen dikeluarkan apabila berupa duplikat, laporan hasil AI atau literature review sekunder yang tidak dapat diverifikasi sebagai artikel akademik primer, preprint yang belum melalui peer review, atau dokumen yang terlalu jauh dari fokus penelitian.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Aspek	Inklusi	Eksklusi
Jenis Dokumen	Artikel jurnal, prosiding, disertasi, dan dokumen akademik yang relevan	Duplikat, ringkasan AI, dokumen populer non-akademik

Tema	Kepemimpinan transformasional, blusukan, partisipasi, <i>trust</i> , <i>governance</i> , <i>sustainability</i>	Tidak membahas kepemimpinan atau tata kelola
Konteks	Perkotaan, pedesaan, pemerintahan lokal, masyarakat, komunitas	Konteks organisasi murni tanpa relevansi publik
Kualitas	Memiliki tujuan, metode, atau argumen akademik yang jelas	Tidak memiliki kejelasan metodologis atau hanya opini lepas
Akses	Teks lengkap tersedia	Teks tidak dapat diperiksa

Proses Seleksi Literatur

Pada tahap identifikasi, ditemukan 39 dokumen awal. Setelah diperiksa, 10 dokumen merupakan duplikasi berdasarkan judul, ukuran file, dan isi yang sama, sehingga dikeluarkan. Dari 29 dokumen unik, sebanyak 7 dokumen dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi, yaitu berupa laporan SciSpace, preprint yang belum melalui peer review, atau dokumen yang tidak cukup relevan dengan fokus kepemimpinan transformasional berbasis blusukan dan tata kelola berkelanjutan. Dengan demikian, 22 dokumen digunakan dalam sintesis tematik. Alur ini disusun mengikuti logika pelaporan PRISMA yang menekankan transparansi identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi studi (Page et al., 2021).

Tabel 2. Ringkasan Seleksi Literatur Berdasarkan PRISMA Adaptif

Tahap	Jumlah	Keterangan
Identifikasi	39	Seluruh dokumen awal yang dihimpun
Duplikasi dikeluarkan	10	Dokumen dengan judul/isi/ukuran sama
Dokumen unik disaring	29	Disaring berdasarkan judul, abstrak, dan fokus kajian
Dikeluarkan	7	Laporan AI, preprint, atau dokumen kurang relevan
Inklusi sintesis	22	Dokumen dianalisis secara tematik

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan sintesis tematik. Setiap dokumen diekstraksi berdasarkan penulis, tahun, fokus kajian, metode, konteks, temuan utama, dan relevansi terhadap pertanyaan penelitian. Proses pengodean dilakukan dengan mengelompokkan literatur ke dalam lima tema: (1) konsep blusukan sebagai kepemimpinan langsung; (2) blusukan sebagai praktik kepemimpinan transformasional; (3) partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik; (4) perbedaan konteks perkotaan dan pedesaan; serta (5) kontribusi terhadap tata kelola berkelanjutan (Nasution, 2014; Wekke, n.d.; Kołomycew, 2019; Florini & Pauli, 2018; Yousefvand, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Literatur

Literatur yang dianalisis menunjukkan keberagaman fokus dan konteks. Literatur tentang blusukan banyak membahas kepemimpinan langsung, komunikasi politik, dan kedekatan pemimpin dengan masyarakat (Nasution, 2014; Wekke, n.d.). Literatur tentang kepemimpinan transformasional menekankan visi, inspirasi, partisipasi, dan perubahan kolektif (Burns, 1978; Bass, 1985; Bass & Riggio, 2006; Kolomycew, 2019). Literatur tata kelola perkotaan lebih banyak menyoroti kepercayaan institusional, partisipasi publik, dan penggunaan teknologi digital (Bruun, 2024; Yousefvand, 2024). Sementara itu, literatur tata kelola pedesaan menekankan partisipasi warga, nilai lokal, jejaring komunitas, dan penguatan kapasitas kelembagaan (Hussain, 2023; Tian & Yan, 2022).

Tabel 3. Pemetaan Tema Literatur

Tema	Fokus Utama	Konteks	Kontribusi Terhadap Artikel
Blusukan	Keterlibatan langsung, komunikasi tatap muka, informasi lapangan	Indonesia, sejarah Islam, kepemimpinan lokal	Menjadi konsep dasar praktik kepemimpinan langsung
Kepemimpinan transformasional	Visi, motivasi, perhatian individual, stimulasi intelektual	Pemerintahan lokal, organisasi publik	Menjadi kerangka teoretis utama
Partisipasi dan trust	Keterlibatan warga, legitimasi, kepuasan, kepercayaan publik	Perkotaan dan pedesaan	Menjelaskan mekanisme dampak blusukan
Tata kelola pedesaan	Musyawarah, jaringan sosial, kapasitas warga, budaya lokal	Rural governance	Menjelaskan konteks pedesaan
Tata kelola perkotaan	Smart governance, pengaduan digital, institusi, data	Urban governance	Menjelaskan konteks perkotaan
<i>Sustainable governance</i>	Kolaborasi lintas aktor, akuntabilitas, keberlanjutan sosial	SDGs dan governance	Menjelaskan arah kontribusi kebijakan

Konsep Blusukan dalam Kepemimpinan Publik

Hasil review menunjukkan bahwa blusukan dipahami sebagai tindakan pemimpin turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nyata masyarakat, berkomunikasi secara langsung, dan mengetahui masalah riil yang tidak selalu tampak dalam laporan birokrasi (Nasution, 2014; Wekke, n.d.). Literatur tentang Nizam al-Muluk menunjukkan bahwa praktik serupa telah memiliki akar historis dalam kepemimpinan Islam, yaitu ketika pemimpin menggunakan kunjungan langsung untuk memastikan program berjalan dan memahami persoalan masyarakat (Nasution, 2014). Literatur tentang Jokowi menempatkan blusukan sebagai gaya komunikasi politik yang menekankan tatap muka, kedekatan sosial, dan keterhubungan pemimpin dengan warga (Wekke, n.d.; Ridhoi et al., 2021).

Dalam kerangka ini, blusukan bukan sekadar kunjungan simbolik, tetapi dapat menjadi mekanisme pengumpulan informasi, pemetaan kebutuhan, dan pembentukan legitimasi kebijakan (Nasution, 2014). Namun, blusukan menjadi bermasalah apabila hanya digunakan untuk membangun citra tanpa penguatan tindak lanjut kebijakan. Oleh karena itu, kualitas blusukan tidak dapat diukur dari frekuensi kunjungan semata, tetapi dari sejauh mana aspirasi masyarakat ditransformasikan menjadi keputusan publik yang dapat dipertanggungjawabkan (Ridhoi et al., 2021; Yousefvand, 2024).

Blusukan sebagai Praktik Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional berbasis blusukan terlihat dalam empat dimensi utama. Pertama, *idealized influence* muncul ketika pemimpin memberi contoh kedekatan, kesederhanaan, dan keberpihakan pada masyarakat. Kedua, *inspirational motivation* muncul ketika pemimpin menggunakan interaksi langsung untuk membangkitkan semangat partisipasi warga. Ketiga, *intellectual stimulation* muncul ketika pemimpin menggunakan informasi lapangan untuk merumuskan solusi baru atas masalah publik. Keempat, *individualized consideration* muncul ketika pemimpin menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan spesifik masyarakat, terutama kelompok rentan (Bass & Riggio, 2006; Kolomycew, 2019; Kamselem et al., 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa blusukan dapat diposisikan sebagai bentuk lokal dari kepemimpinan transformasional. Dalam konteks Jokowi, blusukan sering dikaitkan dengan reformasi birokrasi dan kemampuan mendengar keluhan warga (Ridhoi et al., 2021; Wekke, n.d.). Dalam konteks Dedi Mulyadi, keterlibatan langsung dipadukan dengan simbol budaya Sunda, komunikasi digital, dan narasi kepemimpinan yang membumi (Sarumaha, n.d.). Perbedaan ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan transformasional berbasis blusukan tidak memiliki bentuk tunggal, melainkan beradaptasi dengan karakter sosial dan budaya masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dan Kepercayaan Publik

Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik merupakan dua mekanisme utama yang menghubungkan kepemimpinan blusukan dengan tata kelola berkelanjutan. Pemimpin yang hadir langsung di tengah masyarakat dapat memperpendek jarak sosial antara pemerintah dan warga. Interaksi langsung memungkinkan warga menyampaikan masalah,

menilai respons pemimpin, dan merasa dilibatkan dalam proses tata kelola (Kolomycew, 2019; Mirzaei, n.d.; Hussain, 2023).

Namun, kepercayaan publik tidak otomatis lahir dari kehadiran fisik pemimpin. Kepercayaan membutuhkan konsistensi antara komunikasi, keputusan, dan pelaksanaan kebijakan. Literatur tata kelola perkotaan menunjukkan bahwa trust sangat dipengaruhi oleh kualitas, efisiensi, dan keadilan institusi (Yousefvand, 2024). Dengan demikian, kepemimpinan blusukan harus dihubungkan dengan mekanisme kelembagaan seperti pencatatan aspirasi, sistem pengaduan, pelaporan tindak lanjut, dan evaluasi kinerja (Kasuwi, 2025; Mirzaei, n.d.).

Perbedaan Konteks Perkotaan dan Pedesaan

Dalam konteks pedesaan, efektivitas blusukan banyak dipengaruhi oleh kedekatan sosial, nilai budaya, jaringan informal, musyawarah, dan kepercayaan interpersonal. Pemimpin yang memahami norma lokal cenderung lebih mudah membangun legitimasi. Tata kelola pedesaan juga menuntut penguatan kapasitas warga agar partisipasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu memengaruhi keputusan pembangunan (Hussain, 2023; Tian & Yan, 2022). Oleh karena itu, blusukan di pedesaan perlu diarahkan pada penguatan musyawarah lokal, pemberdayaan kelompok rentan, dan penyelesaian masalah berbasis kebutuhan komunitas.

Dalam konteks perkotaan, blusukan menghadapi kompleksitas yang berbeda. Kota memiliki masyarakat yang heterogen, masalah pelayanan yang kompleks, dan tuntutan respons cepat. Karena itu, blusukan di perkotaan tidak cukup dilakukan melalui kunjungan fisik, tetapi perlu dikombinasikan dengan smart governance, kanal pengaduan digital, keterbukaan data, dan forum konsultasi publik (Bruun, 2024; Yousefvand, 2024). Teknologi dapat memperluas jangkauan partisipasi, tetapi literatur smart city juga menunjukkan bahwa partisipasi digital dapat menjadi problematis apabila warga hanya diposisikan sebagai penyedia data, bukan sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan (Bruun, 2024).

Kontribusi terhadap Tata Kelola Berkelanjutan

Kepemimpinan transformasional berbasis blusukan berkontribusi terhadap tata kelola berkelanjutan melalui tiga jalur. Pertama, jalur informasi, yaitu kemampuan pemimpin memperoleh informasi langsung dari masyarakat. Kedua, jalur relasional, yaitu pembentukan kedekatan, legitimasi, dan kepercayaan. Ketiga, jalur institusional, yaitu kemampuan mengubah aspirasi warga menjadi program dan kebijakan yang terukur. Ketiga jalur ini hanya dapat berjalan apabila blusukan tidak berhenti sebagai gaya personal, tetapi diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola yang kolaboratif dan akuntabel (Nasution, 2014; Bendell et al., 2011; Florini & Pauli, 2018; Kasuwi, 2025).

Tabel 4. Model Konseptual Hasil Sintesis

Dimensi	Makna	Mekanisme	Implikasi Tata Kelola
Blusukan	Kehadiran langsung pemimpin	Observasi lapangan dan dialog warga	Kebijakan lebih sesuai kebutuhan

Transformasional	Pemimpin menginspirasi perubahan	Visi, motivasi, perhatian individual	Partisipasi dan komitmen kolektif
Trust	Kepercayaan terhadap pemimpin dan institusi	Konsistensi tindakan dan tindak lanjut	Legitimasi kebijakan meningkat
Konteks pedesaan	Relasi sosial dan budaya lokal kuat	Musyawarah dan jaringan informal	Governance berbasis komunitas
Konteks perkotaan	Kompleksitas dan digitalisasi tinggi	Smart governance dan kanal pengaduan	Respons pelayanan lebih cepat
Keberlanjutan	Tata kelola inklusif dan akuntabel	Institusionalisasi partisipasi	Kebijakan adaptif dan berkelanjutan

Hasil review menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berbasis blusukan dapat dipahami sebagai model kepemimpinan adaptif yang menghubungkan visi perubahan dengan realitas sosial masyarakat. Blusukan memberi ruang bagi pemimpin untuk memahami persoalan langsung dari warga, sedangkan kepemimpinan transformasional memberi kerangka teoretis untuk menjelaskan bagaimana interaksi tersebut dapat membangkitkan partisipasi, membangun kepercayaan, dan mendorong perubahan tata kelola (Burns, 1978; Bass, 1985; Nasution, 2014; Kolomycew, 2019).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa kepemimpinan publik tidak dapat hanya dilihat dari kewenangan formal. Dalam praktik pemerintahan, legitimasi pemimpin dibentuk melalui kombinasi antara kinerja, komunikasi, simbol, kedekatan sosial, dan konsistensi kebijakan. Blusukan berfungsi sebagai jembatan antara negara dan masyarakat, tetapi jembatan tersebut rapuh apabila tidak disertai sistem tindak lanjut. Karena itu, blusukan perlu dipahami bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan publik (Wekke, n.d.; Ridhoi et al., 2021; Yousefvand, 2024).

Dalam dimensi transformasional, blusukan paling kuat berhubungan dengan individualized consideration dan inspirational motivation. Melalui blusukan, pemimpin dapat menunjukkan perhatian pada masalah spesifik masyarakat. Pada saat yang sama, kehadiran langsung dapat membangun motivasi kolektif karena warga merasa diperhatikan dan dilibatkan. Namun, dimensi intellectual stimulation juga penting karena informasi lapangan seharusnya mendorong inovasi kebijakan, bukan hanya respons karitatif atau penyelesaian kasus per kasus (Bass & Riggio, 2006; Kolomycew, 2019).

Konteks perkotaan dan pedesaan memperlihatkan kebutuhan strategi yang berbeda. Di pedesaan, blusukan efektif ketika dilakukan melalui pendekatan kultural, musyawarah, dan hubungan interpersonal. Dalam konteks ini, pemimpin harus memahami nilai lokal dan struktur sosial komunitas. Namun, pendekatan yang terlalu personal dapat menciptakan ketergantungan pada figur pemimpin. Oleh karena itu, blusukan pedesaan perlu diperkuat dengan kelembagaan lokal seperti forum warga, kelompok tani, lembaga desa, dan mekanisme monitoring partisipatif (Hussain, 2023; Tian & Yan, 2022).

Di perkotaan, blusukan menghadapi tantangan skala dan kompleksitas. Kunjungan langsung pemimpin tidak mungkin menjangkau semua masalah kota secara merata. Karena itu, blusukan perkotaan perlu diintegrasikan dengan sistem digital, dashboard pengaduan, data terbuka, dan forum deliberasi publik. Namun, penggunaan teknologi juga harus dikawal agar tidak mereduksi partisipasi warga menjadi sekadar input data. Partisipasi yang bermakna tetap membutuhkan dialog, umpan balik, dan pengaruh nyata terhadap keputusan publik (Bruun, 2024; Yousefvand, 2024).

Dari perspektif sustainable governance, kontribusi utama kepemimpinan transformasional berbasis blusukan terletak pada kemampuannya memperkuat responsivitas dan inklusi. Tata kelola berkelanjutan tidak hanya menuntut program pembangunan, tetapi juga proses yang adil, transparan, dan mampu bertahan setelah figur pemimpin berganti. Oleh karena itu, praktik blusukan perlu dilembagakan melalui prosedur yang jelas: pencatatan aspirasi, prioritas masalah, tindak lanjut lintas perangkat daerah, publikasi hasil, dan evaluasi dampak (Bendell et al., 2011; Florini & Pauli, 2018; Kasuwi, 2025).

Artikel ini juga menemukan gap penelitian. Pertama, masih sedikit studi yang mengukur secara empiris dampak blusukan terhadap kepercayaan publik, partisipasi warga, dan kualitas layanan publik. Kedua, literatur blusukan masih cenderung membahas aspek komunikasi politik dan personal branding, belum banyak mengaitkannya dengan sustainable governance (Wekke, n.d.; Ridhoi et al., 2021). Ketiga, studi komparatif antara konteks perkotaan dan pedesaan masih terbatas (Hussain, 2023; Tian & Yan, 2022). Keempat, integrasi blusukan dengan smart governance dan tata kelola digital masih menjadi agenda penelitian yang perlu dikembangkan (Bruun, 2024).

KESIMPULAN

Kepemimpinan transformasional berbasis blusukan merupakan model kepemimpinan publik yang relevan untuk memperkuat tata kelola berkelanjutan. Blusukan dapat menjadi bentuk operasional kepemimpinan transformasional karena menghubungkan pemimpin dengan kebutuhan riil masyarakat, memperkuat komunikasi langsung, membangun kedekatan sosial, dan membuka ruang partisipasi warga. Namun, blusukan hanya akan berdampak substantif apabila diikuti dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas dan terlembaga.

Dalam konteks pedesaan, blusukan perlu berakar pada nilai budaya, musyawarah lokal, dan jaringan sosial masyarakat. Dalam konteks perkotaan, blusukan perlu dikombinasikan dengan sistem tata kelola digital, pengaduan publik, dan keterbukaan data. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional berbasis blusukan tidak dapat dipahami sebagai gaya tunggal yang berlaku seragam, tetapi sebagai pendekatan adaptif yang harus disesuaikan dengan konteks sosial-geografis masyarakat.

Kontribusi teoretis artikel ini adalah menempatkan blusukan sebagai praktik lokal dari kepemimpinan transformasional dalam administrasi publik. Kontribusi praktisnya adalah menawarkan model bahwa blusukan perlu dilembagakan melalui sistem pencatatan aspirasi, prioritas masalah, tindak lanjut program, dan evaluasi publik agar mampu mendukung tata kelola yang inklusif, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah dan karakter dokumen yang tersedia. Beberapa dokumen yang relevan bersifat prosiding, disertasi, atau artikel konseptual, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan database akademik yang lebih luas, seperti Scopus, Web of Science, DOAJ, Garuda, dan Google Scholar, dengan protokol pencarian yang terdokumentasi penuh. Penelitian empiris juga diperlukan untuk menguji hubungan antara kepemimpinan transformasional berbasis blusukan, partisipasi masyarakat, kepercayaan publik, dan indikator tata kelola berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achuti, E. O. (2026). Exploring the role of transformational leadership in enhancing financial sustainability of Kenyan public universities: A systematic review. *Journal of Finance and Accounting*, 14(2), 74–87. <https://doi.org/10.11648/j.jfa.20261402.11>
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. Free Press.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Bendell, J., Miller, A., & Wortmann, K. (2011). Public policies for scaling corporate responsibility standards: Expanding collaborative governance for sustainable development. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 2(2), 263–293. <https://doi.org/10.1108/20408021111185411>
- Bruun, M. H. (2024). Algorithmic governance, public participation and trust: Citizen-state relations in a smart city project. *Social Anthropology/Anthropologie Sociale*, 32(4), 13–30. <https://doi.org/10.3167/saas.2024.320402>
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Florini, A., & Pauli, M. (2018). Collaborative governance for the Sustainable Development Goals. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 5(3), 583–598. <https://doi.org/10.1002/app5.252>
- Hussain, A. (2023). People's participation in rural local governance in Jammu and Kashmir. *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 11(8), 80–87.
- Kamselem, S., Sadiq, M. D., & Kyari, G. A. (2026). The role of transformational leadership and post-conflict recovery in Africa: A panacea for peace building initiatives in Borno State, Nigeria. *Journal of Development and Society*, 7(2).
- Kasuwi, M. H. (2025). *The role of public leaders in addressing challenges of good governance: A case of Dodoma City Council*. The Open University of Tanzania.
- Kołomycew, A. (2019). The leadership model and the use of public participation instruments: The case of Polish municipalities. *Humanities and Social Sciences*, 24(26), 67–84.
- Mirzaei, R. (n.d.). Improving trust and increasing social capital in political governance by improving governance and satisfaction with the performance of urban management. *Proceedings of the 10th International Conference on Civil, Architecture*

and Urban Management.

- Nasution, S. (2014). Blusukan: Menelisik gaya kepemimpinan Nizam al-Muluk. *MIQOT*, 38(1), 238–251.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, 71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Ridhoi, M. A., Putri, L. P., & Anggraini, N. (2021). Jokowi di depan dan belakang panggung politik: Dramaturgi terhadap pelemahan KPK. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, 4(2), 111–120.
- Sarumaha, G. A. (n.d.). *Kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi: Gebrakan yang menginspirasi generasi muda*. Manuskrip akademik.
- Tian, T., & Yan, H. (2022). New rural community governance: Analysis framework and comparative case study. *Local Administration Journal*, 15(3), 239–254.
- Wekke, I. S. (n.d.). *Blusukan, komunikasi politik Indonesia di era Jokowi: Kajian literatur awal*. Institut Agama Islam Negeri Sorong.
- Yousefvand, S. (2024). Factors contributing to the decline of institutional trust in urban governance over the past two decades (Case study: Tehran). *Journal of Social Continuity and Change*, 3(2), 437–466. <https://doi.org/10.22034/jssc.2025.22044.1154>